



Berkedok Investasi Bodong, DM Raup Rp 64 Miliar dari 700 Anggotanya

Alat bukti mengarah ke DM, kini kasusnya masuk tahap penyidikan

TANJUNG REDEB, Swara Kaltim

Dugaan kasus penipuan berkedok investasi bodong dengan *iming-iming* menggiurkan meski tanpa jelas apa jenis investasinya yang diduga dilakukan DM (23) kini memasuki tahap penyidikan. Tak tanggung tanggung, dari penyidikan Kepolisian terungkap bahwa DM menggunakan 4 grup *WhatsApp* (WA) yang berbeda dengan jumlah anggota mencapai 700 orang dan total investasi yang diselewengkan mencapai Rp 64 Miliar.

Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Berau AKBP Edy Setyanto Erning Wibowo melalui Kasat Reskrim Polres Berau AKP Ferry Putra Samodra bahwa kelengkapan alat bukti saat ini sudah dilengkapi dan mengarah kepada DM (23), terlapor kasus dugaan penipuan. "Saat ini status DM masih

terlapor, namun sudah ada beberapa bukti yang mengarah kepadanya, akan tetapi kita masih lakukan asas praduga tak bersalah dan masih akan kita dalam lagi," jelas AKP Ferry Putra Samodra, di ruang gelar perkara Satreskrim Polres Berau, pada Rabu (9/6/2021). Ferry juga menyebutkan ada



Kasat Reskrim Polres Berau AKP Ferry Putra Samodra menjelaskan kepada wartawan terkait perkembangan penyidikan investasi bodong di Kabupaten Berau, Kaltim.

beberapa alat bukti yang pihaknya sita diantaranya satu unit mobil, sisa uang yang pernah ditarik oleh DM, beberapa

perhiasan emas dan sejumlah buku rekening. Selain itu untuk nilai transaksi yang telah dilakukan DM, kurang lebih ada Rp 64 Miliar perputaran uang di empat rekening berbeda miliknya dari 700 lembar rekening koran yang sudah dicetak di bank yang bersangkutan. "Dari 700 rekening koran itu, didalamnya ada beberapa transaksi baik debit maupun kredit, jumlah perputarannya sekitar Rp 64 Miliar," jelasnya.

Saat ditanya soal kronologi DM mampu merekrut ratusan anggotam dengan nilai transaksi sampai puluhan Milyar, karena DM mengiming-imingi korbannya agar mau menanam modal kepadanya dan nantinya akan mendapat hasil investasi dari dari uang yang anggotanya

►► Baca: Berkedok ... Hal. 15

Wali Kota Menyapa, Kupas Konsep Riverside City, Tak Ingin Potensi Sungai Mahakam Tidur

SAMARINDA, Swara Kaltim

Wali Kota Samarinda Dr H Andi Harun bersama Wakil Wali Kota (Wawali) Dr H Rusmadi kembali menyapa warga Kota Samarinda, Kamis (10/6/2021) siang.

Berbeda dari biasanya, kali ini dilakukan dari tengah Sungai Mahakam menggunakan kapal wisata *Pesut Etam*. Kegiatan garapan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Samarinda ini berlangsung secara virtual dengan disiarkan secara *live* di *Tepian TV* dan interaktif RRI Samarinda.

Dialog interaktif sembari menyusuri Sungai Mahakam ini menghadirkan narasumber berkompeten seperti pengamat ekonomi lingkungan Bernaulus Saragih, Balai Wilayah Sungai (BWS) Eko Wahyudi, peneliti studi ruang publik Universitas Tujuh Belas Agustus (Samarinda) Wardhana, dan Komite Tetap Bidang Organisasi Kadin Samarinda Wibowo Mapatunru. Kegiatan dialog dipandu *host* Riamitasari.

Dalam dialog itu, Wali Kota memaparkan tentang



Suasana saat dialog interaktif Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda menyapa warga kota Samarinda, sambil menyusuri Sungai Mahakam menggunakan kapal wisata *Pesut Etam*, Kamis (10/6/2021) siang.

konsep *Mahakam Riverside City* dan potensi Sungai Mahakam dalam pengembangan ekonomi di Kota Samarinda.

"Kita sedang menyusun masterplan pengembangan wisata Sungai Mahakam. Karena Samarinda dibelah oleh Sungai Mahakam, maka pengembangan Sungai Mahakamnya dalam konsep *Riverside City*," ucap Andi Harun.

Ia menjelaskan keinginannya untuk menjadikan Sungai

Mahakam, khususnya di kawasan tepian sungai sebagai wadah bagi ekonomi kreatif di Kota Samarinda yang menjadi ikon dan daya tarik bagi masyarakat baik dari luar maupun warga Samarinda sendiri.

"Sungai Mahakam dengan segala potensinya tidak boleh kita biarkan tidur dan harus dimanfaatkan secara ekonomi dalam konteks *Riverside City*," katanya.

Menurutnya, ini dilakukan

secara terpadu, di antaranya melaksanakan reinkarnasi kawasan ekonomi kreatif Citra Niaga.

"Kami sudah bertemu dengan arsitek Citra Niaga. Saat ini tim sudah bekerja," tuturnya.

Ia menyampaikan rencana pengembangan ekonomi dan wisata Sungai Mahakam tersebut, berupa rencana membuat pintu masuk Kota Samarinda dari arah Sungai Mahakam, serta membuat pelabuhan

wisata yang terkoneksi dengan kawasan ekonomi kreatif dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda.

Ia akan menggabungkan rencana pembangunan sektor pariwisata dengan ekonomi kreatif di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

"Dengan pendekatan strategis ini, kita berharap bisa mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Bulan puasa lalu, saya sudah bertemu dengan Menteri Pariwisata Pak Sandiaga Uno. Kita lagi memperjuangkan agar bisa memasukkan agenda dalam rancangan proyek strategis nasional," beber Andi Harun.

Kemudian tentunya lanjut Andi Harun, perlu dukungan perluasan informasi produk Samarinda dengan memanfaatkan pula aplikasi digital marketing. "Dulu kita punya aplikasi *Behambinan*, sekarang namanya *Bebaya Mart*. Ini bisa kita manfaatkan," tandasnya.

Pengembangan konsep *Mahakam Riverside City* ini

►► Baca: Wali Kota ... Halaman 15

Pekerjaan perbaikan jalan Kukar - Kubar tak kunjung selesai Kontraktor Pelaksana Dinilai Lamban

SAMARINDA, Swara Kaltim

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Ekti Imanuel menyoroti lambannya proses pengerjaan proyek perbaikan jalan di poros Kutai Kartanegara-Kutai Barat.

Proyek perbaikan jalan yang masuk dalam program Multi Years Contract (MYC) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) ini di perkirakan bernilai ratusan miliar, saat ini sedang dalam pengerjaan kontraktor yang berasal dari luar Kaltim.

Menurut Ekti, kontraktor yang menjalankan proyek ini terkesan lamban, dan terlihat

sangat kurang maksimal. Hal ini dikarenakan proyek yang diperkirakan berjalan sejak Januari 2021 itu baru berjalan berkisar 20-30 persen. "Saya mengalami sendiri, jadi tahu bagaimana kondisinya," ungkap Ekti.

Ia memaparkan dari proyek yang sedang berjalan ini belum merata. Khusus segmen dari wilayah Gunung Bayan menuju Ibukota Kubar itu telah diaspal, sementara dari Gunung Bayan menuju wilayah Resak itu masih sebagian.

"Sedangkan dari Resak menuju ke Kukar itu belum

ada progres pengerjaan, justru banyak numpuk pasir di pinggir jalan," terang Anggota DPRD Kaltim asal daerah pemilihan (Dapil) Kubar-Mahulu ini.

Dikabarkan Gubernur Kaltim Isran Noor akan berkunjung ke Kubar pada 10 Juni mendatang, hal itu membuat kontraktor akhirnya bergerak untuk memperbaiki pekerjaan.

Menurut Ekti, semestinya jangan mesti menunggu Gubernur ingin melintas baru dirapikan.

Paling tidak, siapapun yang melakukan pekerjaan harus bisa bekerja maksimal, karena

jalan ini merupakan urat nadi dari warga di Kabupaten Kubar maupun Mahakam Ulu.

Ia berharap, proyek yang telah berjalan ini dapat maksimal dalam pelaksanaannya, guna mendapatkan hasil jalan-an yang terbaik sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

"Harapannya tentu ada progres yang cepat," tutur Ketua

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kubar ini. Ekti menilai kurangnya persiapan dan menjadi lambat.

"Paling tidak ke depan bisa dijadikan segmen penilaian terkait jarak ataupun lokasi perusahaan dalam setiap lelang. Karena kalau lambat ini akan merugikan daerah juga," tukasnya. (dprd-kaltimprov.go.id)

Tingkatkan Akurasi Perencanaan Sektor Energi Nasional

JAKARTA, Swara Kaltim

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, menginginkan Kementerian ESDM untuk memperbaiki sistem perencanaan energi nasional agar dapat terwujud tahapan pengembangan sektor energi di Tanah Air yang lebih akurat ke depannya.

"Tahapan dan jadwal perencanaan energi yang akurat adalah soal yang sangat penting. Ini adalah setengah keberhasilan. Bila perencanaannya baik maka harapannya implementasinya menjadi semakin terarah," kata Mulyanto dalam rilis di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, saat ini adalah waktu yang tepat bagi Kementerian ESDM memperbaiki sistem perencanaan energi karena sekarang tengah dilakukan pembahasan rencana kerja anggaran Kementerian ESDM tahun 2022 bersama DPR RI yaitu Komisi VII. Upaya ini perlu dilakukan agar antara perencanaan kinerja dengan perencanaan anggaran terdapat kesesuaian.

Sampai hari ini, lanjut politisi Fraksi PKS itu, Kementerian ESDM belum mengesahkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2021-2030 dan revisi RIJTD GBN

(Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional) tahun 2019-2038.

Padaحال tanpa adanya dokumen RUPTL dan RIJTD GBN yang sah, ujar dia, usaha penyediaan listrik dan pengadaan jaringan gas bumi ini tidak akan dapat diimplementasikan dengan baik.

Mulyanto menambahkan sebenarnya pemerintah punya Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang ditetapkan dengan Perpres (Peraturan Presiden), Rencana Umum Kelistrikan Nasional (RUKN) yang ditetapkan Menteri ESDM dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang disusun PLN.

Melihat tenggat waktu yang sudah berjalan, Mulyanto pesimis berbagai usaha penyediaan listrik dan pengadaan ruas transmisi (RT) dan wilayah jaringan distribusi (WJD) gas bumi dapat terlaksana secara optimal. Masalah ini juga mengemuka saat pembahasan rencana kerja anggaran Kementerian ESDM kemarin senin 7/6/2021.

Untuk itu, Mulyanto meminta Kementerian ESDM mencontoh perencanaan yang dibuat Kementerian PPN/Bappenas dalam Sistem Perencanaan

Nasional.

"Dalam sistem perencanaan tenaga listrik dan migas ini mestinya jelas siapa aktor penyusunnya, tahapan, serta jadwalnya. Termasuk adanya semacam Musrenbangnas (musyawarah perencanaan pembangunan nasional)," ungkapnya.

Ia mendesak agar pemerintah untuk lebih serius menyusun perencanaan di bidang ketenagalistrikan dan migas ini.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan sejumlah strategi jangka panjang di sektor energi untuk bisa mencapai target karbon netral atau net zero emission (bebas emisi karbon) pada 2060 mendatang.

"Di sektor energi, kami menargetkan bisa mencapai karbon netral pada 2060 atau lebih cepat dengan bantuan internasional dengan sejumlah strategi. Pertama, melalui pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) yang masif," kata Arifin dalam webinar bertajuk "Indonesia-Norway Investment Opportunities in Hydro and Solar Energy in Indonesia" yang diselenggarakan oleh KBRI Oslo, Senin (7/6/2021). (ant)

Kemenkeu: Program Perlindungan Sosial Tekan Angka Pengangguran

JAKARTA, Swara Kaltim

Kementerian Keuangan mengatakan program perlindungan sosial (Perlinsos) pemulihan ekonomi nasional mampu menekan tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2021 menjadi 6,26 persen atau 8,75 juta orang.

"Pada Agustus 2020 tingkat pengangguran terbuka 7,07 persen atau 9,77 juta orang, ada penurunan 0,81 persen," kata Direktur Dana Transfer Umum Kemenkeu Adriyanto dalam diskusi "Kemenkeu Corpu Talk" secara daring di Jakarta, Kamis.

Pemulihan ekonomi, ujar Adriyanto, telah menciptakan 2,61 juta lapangan pekerjaan baru selama September 2020 hingga Februari 2021. Khususnya dari sektor strategis seperti manufaktur, pertanian, perdagangan, dan jasa penyediaan akomodasi dan makanan minuman.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Covid-19 memberikan dampak cukup signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Secara nasional, pada Februari 2020 tingkat pengangguran berjumlah 4,94 persen dan melonjak menjadi 7,07 persen pada Agustus 2020.

Kenaikan pengangguran tertinggi terjadi di Bali dan Nusa Tenggara yang naik dua kali lipat dari sebelumnya 2,31 persen menjadi 4,71 persen pada Agustus 2020. Melalui program Perlinsos, tingkat pengangguran terbuka di Bali

dan Nusa Tenggara bisa diturunkan menjadi 4,26 persen.

Adriyanto menjelaskan bahwa penurunan tingkat pengangguran terbuka terjadi merata di kota maupun desa. Jika pada Agustus 2020, tingkat pengangguran terbuka di kota sebanyak 8,98 persen maka pada Februari 2021 berhasil ditekan 0,98 persen menjadi 8 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka di desa berhasil ditekan menjadi 4,11 persen dari sebelumnya 4,71 persen.

Ia juga menuturkan bahwa program Perlinsos PEN mampu menahan kenaikan tingkat kemiskinan dengan menjaga tingkat konsumsi kelompok termiskin. Tingkat kemiskinan dikendalikan menjadi 10,19 persen pada September 2020.

"Tanpa program PEN, Bank Dunia memprediksi angka kemiskinan Indonesia 2020 dapat mencapai 11,8 persen, artinya PEN 2020 diperkirakan mampu menyelamatkan lebih dari 5 juta orang dari kemiskinan," ungkapnya.

Pada 2021 pemerintah berupaya memperkuat efektivitas program Perlinsos PEN. Hingga 18 Mei, Perlinsos PEN telah realisasi Rp57 triliun atau 39 persen dari pagu. Dana tersebut untuk mendukung diantaranya 9,71 juta KPM PKH, 15,93 juta KPM Kartu Sembako, 10 juta KPM bansos tunai, 2,77 juta penerima kartu PraKerja, 3,97 juta KPM BLT Desa, serta bantuan kuota internet untuk 27,7 juta penerima. (ant)

Swara Kaltim

KORANNYA ORANG KALTIM

Penerbit : PT. Media Swara Kaltim

Direktur Utama : Erwin Yuniar

Komisaris : Siti Jariah

TARIF IKLAN : * Umum/Display (BW) : Rp 12.500,-/mmk. * Spot color : Rp 17.500,-/mmk. * Full color : Rp 22.500,-/mmk. * Halaman 1 BW : Rp 25.000,-/mmk. * Halaman 1 FC : Rp 45.000,-/mmk. * Iklan Deret (baris) : Rp 5.000,-/mmk. * Iklan Keluarga (Duka Cita) : Rp 10.000,-/mmk

PEMIMPIN REDAKSI : Mohammad Abdun Kuddu. PENANGGUNG JAWAB : Muhammad Syafranuddin. REDAKTUR PELAKSANA : M.Norjaya. REPORTER : Suherman, Sri Endang Purniawati, S. Iman Santoso, Doni Ari Wardana, Slamet Riyanto, Arbani, Andi Isnar, Nihayatun Hayati. EDITING : Alfian Nur. FREELANCER : Riki Perdana, Sofie Lestari. MARKETING / IKLAN : Andi Isnar (HP. 081249999220). KORESPONDEN DAERAH : Tenggara : Agus. Kutai Timur : - Jl. P. Diponegoro Gg. Taruna No.3 (HP. 0811557501). Kutai Barat : Alfian Nur (Jl Damai Raya, RT 05 Barong Tongkok, Sendawar. (HP: 081349444077). Balikpapan : Slamet Iman Santoso (Komplek Taman Sari Bukit Mutiara C-2 No.7 (HP. 081250577750). Penajam Paser Utara : Max Rempas (HP. 081350266123). Bontang : Burhanuddin (Jl. Flores No. 10 HP. 082158144444). Berau : B. Nihayatun Hayati, Jl. Durian III Perum Berau Indah Blok D 10 No. 4 Tanjung Redeb, Berau (HP. 0811599673). BAGIAN KEUANGAN : Rina Puspita. DESIGN GRAFIS / LAYOUT : Arbani, Muhammad Richie Eresty. PERCETAKAN : Swara Kaltim. ALAMAT PERCETAKAN : Jl Gerilya Gg Keluarga, RT. 102, No.027 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda. ALAMAT REDAKSI / PEMASARAN : Jl Gerilya Gg Keluarga, RT. 102, No.027 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda (Kaltim). E-mail : mediaswarakaltim@yahoo.com Website / Online : www.swarakaltim.com

Dalam menjalankan tugas jurnalistik Wartawan Swara Kaltim dibekali tanda pengenal, atau nama mereka tercantum dalam Box Redaksi.



Dua Pesan Gubernur untuk Peternak Jonggon

LOA KULU, Swara Kaltim

Gubernur Kaltim H Isran Noor meninggalkan dua pesan penting saat bertemu dan berdialog dengan para peternak di Desa Jonggon Jaya, Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara (Kukar).

Pesan pertama, agar semua peternak melakukan konsolidasi dalam kelompok atau organisasinya. Menurut Isran, organisasi yang solid akan sangat membantu sukses organisasi dan anggotanya.

"Anggotanya tadi 11 orang ya. Bagus, harus lebih solid dan kompak," kata Isran di lokasi Mini Ranch Jayatama di Desa Jonggon Jaya, Loa Kulu, Kamis (10/6/2021).

Pesan kedua Gubernur agar para peternak dapat terus meningkatkan kemampuan kelompok dan anggotanya.

Peningkatan kemampuan yang dimaksud adalah terkait teknik pengelolaan ternak yang baik, termasuk integrasi perkebunan sawit dan pemanfaatan



lahan eks tambang, seperti dilakukan di lahan konsesi PT MHU yang dikelola PT Bramasta Sakti.

Khusus para peternak di kawasan Jonggon kata Gubernur, patut bersyukur karena dukungan untuk mereka sangat besar. Baik melalui program pemerintah, termasuk bantuan dari perusahaan.

Menanggapi beberapa permohonan peternak seperti traktor pengolah lahan dan mesin pengolah pakan, Gubernur mengatakan bahwa semua usulan sudah dicatat, namun ia tak ingin berjanji.

"Semua usulan sudah dicatat. Pak Sunggono (Sekda Kukar) juga mencatat. Tapi saya tidak janji karena semua masih harus dihitung agar bantuan efektif dan efisien. Dukungan

seperti ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya," tegas Isran.

Pengembangan ternak di areal lahan eks tambang menurut Gubernur Isran Noor akan sangat membantu upaya pemerintah menuju swasembada daging di Kaltim. Pasalnya, hingga saat ini Kaltim masih sangat bergantung dengan pasokan sapi dari NTT, NTB dan Sulawesi.

Populasi sapi di Kaltim pada 2020 sebanyak 123 ribu ekor, sementara untuk swasembada daging Kaltim butuh 650 ribu ekor. "Kemampuan kita baru sekitar 27 persen. Sedangkan 73 persen lainnya masih datangkan dari NTT, NTB dan Sulawesi," kata Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kaltim Munawar saat memberi laporan.

Usai menyerap aspirasi peternak, Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi melakukan peletakan batu pertama pembangunan kandang tahap 2 Mini Ranch Jayatama - PT Bramasta Sakti dan melakukan inseminasi buatan. Areal penggembalaan sapi yang disiapkan PT MHU tidak kurang dari 200 hektare. Di lokasi ini juga disiapkan layanan untuk sapi bunting dan melahirkan, sekaligus mengurangi tingkat kematian pedet (anak sapi). Saat kegiatan berlangsung hadir Presdir PT MHU Adhi Mustopo dan Pimpinan Yayasan Life After Mine Andrew Hidayat. Hadir mendampingi para kepala OPD terkait Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Kartanegara. (sul / humasprovkaltim / adv / aya / sk)



DWP Gelar Khataman Al-Qu'ran dan Halal Bihalal

SAMARINDA, Swara Kaltim

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Kaltim melalui Bidang Sosial dan Budaya menggelar Khatam Al-Quran di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Kamis, 10 Juni 2021, dihadiri Penasehat DWP Kaltim Hj Norbaiti Isran Noor.

Acara bertema *Khotmil Qur'an Memupuk Iman dan Perkuat Persatuan Umat*, menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dirangkai halal bihalal dihadiri Ketua DWP Provinsi Kaltim Hj Lisa Febriani Sa'bani, seluruh anggota/pengurus DWP Kaltim dan UP DWP SKPD, serta pimpinan organisasi wanita di Kaltim.

Kitab suci Al-Qur'an menurut Hj Norbaiti, bukan sekedar dibaca atau kitab bacaan umat Islam, tapi kitab yang berisikan tuntunan hidup dan kebaikan bagi orang yang membaca serta mengamalkannya.

"Karenanya, budayakan membaca Al-Qur'an. Kalau bisa setiap saat, atau minimal setelah ibadah shalat dan sewaktu senggang," kata Hj Norbaiti, istri Gubernur Kaltim Isran Noor ini.

Bagi Ketua TP PKK Kaltim ini, Ramadhan baru lalu menjadi tonggak, sekaligus bulan

men-tadaburi Al-Qur'an.

"Nah setelah Ramadhan, kebiasaan membaca Al-Qur'an harus terus dilakukan. Khataman hari ini, bukan berarti berhenti membacanya. Ini hanya penanda kalau kita semua selesai membaca 30 juz Al-Qur'an," ungkapnya.

Istri orang nomor satu Benua Etam ini, berharap dan mendoakan semoga kegiatan selama Ramadhan hingga acara khataman selalu mendapatkan keberkahan dan berlimpah rahmat oleh Allah Subhanalahu Wa Ta'ala.

Ketua DWP Provinsi Kaltim Hj Lisa Febriani Sa'bani menyampaikan khataman rangkaian dari tadarus Al-Qur'an pada Ramadhan lalu yang diikuti anggota/pengurus seluruh UP DWP SKPD lingkup Pemprov Kaltim.

"Khataman ini puncak rangkaian kegiatan Ramadhan lalu. Kami bersama UP DWP SKPD melaksanakan berbagai kegiatan bhakti sosial, santunan, bazar dan tadarus yang diakhiri khataman dan halal bihalal hari ini," ujar Lisa Sa'bani, seraya menambahkan acara diisi ceramah agama (tausiyah) oleh Hj Abnan Pancasilawati.

(yans / sdn / humasprovkaltim / adv / aya / sk)

Doa Bersama Sebelum Kunjungan Kerja

SAMARINDA, Swara Kaltim

Gubernur Kaltim H Isran Noor dan Wakil Gubernur (Wagub) H Hadi Mulyadi hari ini akan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Barat. Kehadiran duet pemimpin *Benua Etam* itu untuk memastikan program Kaltim Berdaulat berjalan sesuai harapan meski pandemi Covid-19 masih mengancam.

Kepala Biro Infrastruktur dan SDA Hj Lisa Hasliana sebelum keberangkatan kunjungan kerja tersebut melaporkan ada empat titik lokasi yang akan menjadi target kunker. Satu di Kutai Kartanegara dan tiga lokasi di Kutai Barat. "Lokasi pertama kita akan melihat pengembangan ternak sapi di Miniranch Jayatama di Desa Jonggon, Loa Kulu Kutai Kartanegara," kata Lisa Hasliana di Ruang Pan-durata Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (10/6/2021).

Di lokasi pertama Gubernur dan Wakil Gubernur akan berdiskusi dengan peternak



yang menggembalakan sapi di atas lahan yang merupakan konsesi tambang PT MHU dalam kelola PT Bramasta.

Gubernur juga akan menyerahkan bantuan obat cacing dan melakukan inseminasi buatan. Setelah itu rombongan akan langsung bergerak menuju Barong Tongkok di Kutai Barat. Kamis malam, Gubernur dan Wakil Gubernur akan dijamu Bupati Kutai Barat di Aula Balai Agung Aji Julur Jejangkat.

Kunker akan dilanjutkan pada Jum'at (11/6/2021) dengan mengunjungi tiga lokasi. Lokasi pertama perkebunan

karet di Kampung Juaq Asa, Kecamatan Barong Tongkok. Lokasi kedua Kampung Sumber Bangun, Sekolaq Darat untuk pertanian hortikultura. Gubernur direncanakan memanen cabai di lokasi ini. Kunjungan akan diakhiri dengan peresmian underpass PT Firman Ketaun Perkasa di Desa Muara Lawa, Kecamatan Damai, Kutai Barat.

Selain Gubernur dan Wakil Gubernur, sejumlah kepala OPD terkait turut mendampingi. Keberangkatan rombongan pagi ini diawali dengan doa bersama demi kelancaran kunjungan kerja. (sul / humasprovkaltim / adv / aya / sk)



Hukum & Kriminal



Perlindungan Hukum bagi Anggota Korpri

SAMARINDA, Swara Kaltim

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim HM Sa'bani yang juga Ketua Dewan Pengurus Korpri Provinsi Kaltim membuka Sosialisasi Hukum dan Pembentukan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Korpri.

Sa'bani mengatakan, LKBH Korpri merupakan upaya tindak lanjut implementasi UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 126 ayat 3 yang mengamanatkan Korpri untuk memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota Korpri terhadap dugaan pelanggaran masalah hukum dalam melaksanakan tugas.

"Eksistensi LKBH Korpri bukan saja strategis untuk mendorong pemberian perlindungan hukum tapi juga memberikan fungsi advokasi dan sosialisasi pencegahan tindak korupsi," kata Sa'bani dihadapan peserta sosialisasi dari dewan pengurus Korpri kabupaten/kota, Instansi vertikal, OPD dan BUMD, yang digelar di Hotel Midtown Ballroom Samarinda, dikutip *Swara Kaltim* melalui berita Biro Humas Setprov Kaltim, Kamis (10/6/2021).

Sa'bani menambahkan, Dewan Pengurus Korpri Kaltim menyambut baik adanya sosialisasi Hukum dan Pembentukan LKBH Korpri, dan menghimbau kepada semua Pengurus Korpri untuk memahami bagaimana selanjutnya mendapatkan mekanisme



Sekdaprov Kaltim HM Sa'bani menyampaikan sambutan dihadapan peserta sosialisasi dari dewan pengurus Korpri kabupaten / kota, Instansi vertikal, OPD dan BUMD, di Hotel Midtown Ballroom Samarinda, Kamis (10/6/2021).

bantuan advokasi dan bantuan hukum.

"Kedepan saya berharap LKBH Korpri dapat merangkul ASN yang berlatar belakang Sarjana Hukum untuk membentuk Forum Konsultasi dalam upaya pengembangan SDM dan tukar informasi terhadap dinamika persoalan hukum," tandasnya.

Sa'bani kembali mengingatkan kepada anggota Korpri yang telah terikat dengan sumpah dan janji sebagai anggota Korpri yang di antaranya berisi pernyataan bahwa anggota Korpri berjuang menegakan kejujuran dan keadilan.

"Saya menghimbau kepada anggota Korpri jangan sampai terjerat kasus hukum, apalagi terjerat kasus Tindak Pidana Korupsi (KKN), karena apabila terbukti melakukan pelanggaran tersebut maka resikonya mendapat sanksi

berat.

"Jaga terus citra organisasi Korpri dan tingkatkan etos kerja yang maksimal dan lebih diutamakan dapat memenuhi harapan publik yang kita layani," papar Sa'bani.

Ketua Penyelenggara Sosialisasi Hukum dan Pembentukan LKBH Korpri Kaltim

Diddy Rusdiansyah Anandani dalam laporannya mengatakan, kegiatan sosialisasi dilaksanakan dalam 1 hari dan di ikuti 65 peserta dari Dewan Pengurus Korpri Kaltim, Kabupaten/kota, Dewan Pengurus Korpri Unit Instansi Vertikal Provinsi Kaltim, Dewan Pengurus Korpri Unit

OPD Kaltim, Dewan Pengurus Korpri Unit BUMD Provinsi Kaltim.

"Maksud diselenggarakannya Sosialisasi Hukum dan pembentukan LKBH adalah guna mewujudkan perlindungan hukum bagi ASN (anggota Korpri). Dan Tujuannya adalah terbentuknya LKBH Korpri pada setiap jenjang kepengurusan Korpri," kata Diddy Rusdiansyah Anandani.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan kerjasama yang dilakukan Ketua Dewan Pengurus Korpri Provinsi Kaltim Muhammad Sa'bani dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Peradi Suara Advokad Indonesia Provinsi Kaltim Hendrich Juk Abeth SH, dan disaksikan Asisten pemerinthan dan Kesra, Asisten Admimnistrasi Umum Setdaprov Kaltim, Kepala Biro Hukum Setdaprov Kaltim, Sekretaris Dewan pengurus Korpri Kaltim. **(aya / sk)**

**RUMAH & TANAH
DIJUAL**



**DIJUAL
SEGERA**

**Rumah
2 Tingkat**

Lantai 1:
Kamar Tidur,
Ruang Tamu,
Dapur, WC

Lantai 2:
6 Kamar Kost,
Dapur, WC

Fasilitas: PLN, PDAM, Telp. Rumah
Alamat: Jl. Hasan Basri (ex. Jl. Merak) Gang 2
 Kelurahan Temindung Permai - Samarinda
Sertipikat Hak Milik. Harga Nego. Tanpa Perantara
Hubungi: HP. 081347762211



**Kartika's
Spa**

Health Treatment,
Spa & Massage

**OPEN
24h**

**Popular
Menu**



Nasi Goreng Kartika



Sop Buntut Begadang



Mie Goreng



Mantau Lada Hitam



Tempe/Tahu Goreng



Pisang Goreng

Traditional Massage	Rp 250.000
VIP Room	Rp 100.000
Facial Whitening	Rp 350.000
Facial Acne	Rp 350.000
Menicure	Rp 189.000
Pedicure	Rp 204.000
Under Eye Mask	Rp 78.000
Extrasi Komedo Ringan	Rp 78.000

RESERVASI
089690732154

For Spa & Massage
Please Dial Extension **7000**

hotelgrandkartika | Jl. KH. Khalid No. 35 Samarinda 75111

Kafilah Berau peringkat ke-5 MTQ Tingkat Provinsi Kaltim di Bontang Sekda Gazali: Prestasi Penting, Namun Lebih Utama Tegakkan Syiar Agama



M. Gazali, Sekretaris Daerah Kabupaten Berau.

TANJUNG REDEB, Swara Kaltim

Kafilah asal Kabupaten Berau pada Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-42 Tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di Kota Bontang sejak tanggal 5-9 Juni 2021, berhasil meraih peringkat ke-5 dengan nilai akhir 53. Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Berau Muhammad Gazali, apapun prestasi yang diraih, gelar juara bukan merupakan tujuan utama untuk mengikuti MTQ. "Jadi prestasi penting, namun lebih utama yang menjadi tujuan melalui MTQ ini adalah menegakkan syiar agama," kata Gazali.

Selain itu tambahnya, melalui even tersebut turut membina ukhuwah Islamiyah di tengah kondisi bangsa saat ini. Dengan peringkat ke-5 yang diperoleh merupakan hasil dan kerja keras semua pihak artinya patut di syukuri.



Suasana saat penutupan MTQ ke-42 di kota Bontang, baru-baru ini.

"Dari keberhasilan diperoleh saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya, mudah-mudahan kedepan bisa meningkatkan prestasi dari yang diraih saat ini," papar Sekda.

Masih menurut beliau, mewakili Pengurus LPTQ Kabupaten Berau dirinya menyampaikan permohonan maaf kepada Pemerintah Ka-

bupaten (Pemkab) Berau dan seluruh masyarakat Bumi Batiwakkal karena belum dapat meningkatkan peringkat.

"MTQ mendatang mari bersama-sama kita tingkatkan prestasi. Untuk mencapai hal tersebut, perlu dukungan dan kerjasama seluruh pihak. Yang terpenting dari semua itu, semoga apa yang kita

lakukan ini menjadikan Berau mendapat berkah dari Allah SWT," imbuh Sekda Gazali.

MTQ ke-42, Selasa malam (8/6) tersebut resmi ditutup Gubernur Kaltim Isran Noor. Dimana pemenang dari MTQ di Bontang itu berhasil meraih juara 1 kafilah asal Kutai Kartanegara, juara 2 kafilah Bontang, juara 3 kaf-

ilah Samarinda, juara 4 kafilah Balikpapan, juara 5 kafilah Berau, juara 6 kafilah PPU. Kemudian juara 7 kafilah Paser, juara 8 kafilah Kutai Timur, dan juara 9 kafilah Kutai Barat. Sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu absen, rencananya untuk tuan rumah MTQ ke-43 tahun 2022 nantinya akan digelar di Kota Samarinda. (nht / ***)

Antisipasi Bencana di Kaltara, Satlinmas Penting Lindungi Warga

TARAKAN, Swara Kaltim

Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang mengatakan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di provinsi itu penting untuk perlindungan masyarakat, khususnya terkait dengan ancaman berbagai macam bencana alam..

"Sehubungan dengan potensi beragam bencana yang akan dihadapi ke depan, anggota satlinmas diharapkan dapat membantu aparat keamanan dalam menanggulangi hal tersebut," katanya dalam pernyataan yang diterima di

Tarakan, Kamis (10/6/2021).

Gubernur menyampaikan itu pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Kabupaten Malinau Tahun 2021 secara daring di Tanjung Selor, Rabu (9/6).

Dia mengatakan bahwa satlinmas merupakan salah satu elemen penting dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Perlindungan yang dimaksud, kata dia, adalah upaya dalam penanganan untuk memperkecil dan mengu-

rangi kemungkinan terjadinya bencana.

Ia mengatakan bahwa ada beberapa pola perlindungan masyarakat yang dapat dilakukan. Di antaranya yakni tindak-an awal, seperti melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat, membangun jaringan deteksi dini, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai norma dan peraturan serta tindakan lainnya. "Pola perlindungan kedua adalah tindakan pencegahan, seperti melakukan penjagaan, pengawalan dan patroli, melakukan deteksi atau per-

ingatan dini, serta melakukan koordinasi antara aparat dan masyarakat," katanya.

Ia menambahkan bahwa satlinmas berfungsi sebagai mata dan telinga pemerintah, yang hadir di tengah-tengah masyarakat untuk dapat melihat dan mendengarkan secara langsung berbagai aspirasi.

Menurut Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang mustahil bagi seorang pimpinan untuk dapat menjaga keamanan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai elemen.

Tidak hanya itu, gubernur juga menyampaikan bahwa satlinmas merupakan salah satu potensi yang dapat diberdayakan pada tingkat desa, kecamatan, kabupaten, serta provinsi dalam membantu menjaga keamanan, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat secara swakarsa.

Diingatkan juga pentingnya penerapan protokol kesehatan Covid-19 di tengah menjalankan tugas dan kehidupan sehari-hari demi memutuskan rantai penularan Covid-19 di Kaltara, demikian Zainal Arifin Paliwang. (ant)

Pelataran Sekolah

30 Persen Sekolah Telah Menggelar Belajar Tatap Muka

JAKARTA, Swara Kaltim

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menyebut bahwa sekitar 30 persen sekolah di Indonesia telah melakukan pembelajaran secara tatap muka (PTM) terbatas. Sekolah menggelar PTM terbatas sesuai situasi dan kondisinya masing-masing.

Sebagian baru memulai PTM terbatas beberapa bulan terakhir. Ada pula yang sudah melakukan PTM terbatas sejak tahun lalu.

Nadiem menyampaikan, sekolah yang sudah atau dalam proses melakukan PTM terbatas dengan durasi belajar dan jumlah murid berbeda tetap diperbolehkan selama mengikuti protokol kesehatan.

Selain itu, sekolah juga harus di bawah batas maksimal yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

"Tidak ada perubahan dalam SKB. SKB tersebut menuangkan aturan maksimal. Sekolah bisa menerapkan PTM terbatas dengan sedikit demi sedikit," kata Nadiem Makarim di kantor Kemendikbudristek, Jakarta, Rabu (9/6/2021).

Mantan Bos Gojek Indonesia itu menekankan, PTM terbatas tidak sama seperti sekolah tatap muka biasa. "Apa yang Bapak Presiden sampaikan pada Senin (7/6/2021) lalu benar bahwa

pembelajaran yang kita upayakan bersama adalah tatap muka terbatas. Sekali lagi, terbatas," tekan Nadiem.

Menurut Nadiem, Presiden Jokowi memberikan contoh praktik baik dalam melaksanakan PTM terbatas.

Satuan pendidikan dapat mengatur satu kelas hanya diisi 25 persen murid, kegiatan belajar mengajar hanya dua jam dan satu minggu hanya dua kali pertemuan.

Presiden menyampaikan bahwa pembelajaran jarak jauh pada kenyataannya menyulitkan anak, orang tua, dan guru.

Untuk itu PTM terbatas bisa dijadikan jalan tengah antara kesulitan belajar secara jarak jauh dengan kekhawatiran penularan Covid-19.

"Beliau menyampaikan, kita harus memiliki keberanian untuk mendorong PTM terbatas yang tentu saja

disertai penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat," tutup Nadiem Makarim. (mdc / sk)

Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Tidak Sama Seperti Sekolah Biasa

JAKARTA, Swara Kaltim

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim meluruskan mispersepsi yang terjadi dalam beberapa pemberitaan terkait pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas. Nadiem sekali lagi menyatakan, PTM terbatas tidak sama seperti sekolah tatap muka biasa.

"Apa yang Bapak Presiden sampaikan pada 7 Juni 2021 itu benar, bahwa pembelajaran yang kita upayakan bersama adalah tatap muka terbatas. Sekali lagi, terbatas," ucap dia melansir laman Kemendikbud, Rabu (9/6/2021).

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan contoh praktik baik dalam melaksanakan PTM terbatas. Di mana satuan pendidikan dapat mengatur satu kelas hanya diisi 25 persen murid. Kegiatan belajar mengajar juga hanya dua jam, sedangkan dalam satu minggu hanya dua kali pertemuan.

Menteri Nadiem menyebut, bagi sekolah yang sudah atau dalam proses melakukan PTM terbatas dengan durasi belajar dan jumlah murid berbeda tetap diperbolehkan, selama mengikuti protokol kesehatan.

Namun harus tetap di



Nadiem Makarim

bawah batas maksimal yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

Lanjut dia menegaskan, tidak ada perubahan dalam SKB 4 Menteri.

SKB yang telah dibuat menuangkan aturan yang maksimal.

"Sekolah bisa menerapkan PTM terbatas dengan sedikit demi sedikit," jelas dia.

Seperti diketahui, sekitar 30 persen satuan pendidikan telah melakukan PTM terbatas sesuai situasi dan kondisinya masing-masing.

Sebagian baru memulai PTM terbatas beberapa bulan

terakhir, ada pula yang sudah melakukan PTM terbatas sejak tahun lalu.

"Seperti halnya para guru, orangtua, dan murid yang saya dengar langsung keluhannya dalam melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ), Presiden Jokowi juga menyampaikan kepeduliannya," sebut Nadiem.

Jadi, lanjut dia, Jokowi menyampaikan PJJ pada kenyataannya menyulitkan anak, orangtua, dan guru.

"Beliau menyampaikan, kita harus memiliki keberanian untuk mendorong PTM terbatas yang tentu saja disertai penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat," tukas Nadiem. (kcm / sk)



IKKD dan Teknis Pengukuran IPKD

SAMARINDA, Swara Kaltim

Pemprov Kaltim melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) menggelar Sosialisasi Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) dan Teknis Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Provinsi Kaltim 2021, di Aula Balitbangda Kaltim, dikutip *Swara Kaltim* melalui berita Biro Humas Setprov Kaltim, Kamis (10/06).

Kegiatan yang diikuti organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Kaltim dan kabupaten/kota secara luring dan daring ini dibuka Sekda Prov Kaltim diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah Muhammad Kurniawan.

"Sosialisasi ini dinilai penting dan strategis sesuai dengan amanat dari Permendagri Nomor 19/2020 yang mengatur tentang IPKD dan Permendagri Nomor 38/2020 tentang IKKD. Dimana untuk daerah, khususnya di Kaltim, kedua amanat Permendagri tersebut dijalankan oleh Balitbangda Prov Kaltim.

"Melalui kegiatan ini OPD

dapat mengetahui dokumen apa saja yang diperlukan untuk melengkapi indikator penilaian dari IKKD dan IPKD, sebagai instrumen dan sarana mendorong pemerintah daerah untuk berkompetisi dalam memperbaiki pengelolaan keuangan daerah. serta menilai kepemimpinan kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah," jelas Kurniawan.

Menurut Kurniawan, Kaltim untuk wilayah Indonesia tengah dan timur termasuk dalam provinsi berkategori baik untuk beberapa indikator penilaian pembangunan di berbagai sektor. Salah satunya dapat dilihat dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Kaltim, serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari Kementerian PAN-RB.

"Semoga ini memberikan banyak manfaat bagi pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan kinerja di berbagai bidang pembangunan," ujar Kurniawan dihadapan

nara sumber Kepala Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Kemendagri Sumule Tumbo serta perwakilan Forkopimda Kaltim yang hadir pada kegiatan ini.

"Kepala Balitbangda Abdulh Sani mengungkapkan IPKD dan IKKD ini baru pertama dinilai tahun 2021 ini dan awardnya akan di berikan oleh Puslitbang Kemendagri. Provinsi Kaltim dan Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) sudah memenuhi syarat untuk melakukan pengukuran teknis kedua indeks tersebut.

"Syaratnya kepala daerah sudah memimpin selama kurang lebih dua tahun dan konsisten menjalankan program pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pak Isran Noor sudah dua tahun lebih memimpin Kaltim, sementara untuk kabupaten / kota hanya PPU yang masuk kriteria, karena sembilan daerah lainnya di Benua Etam kepala daerahnya baru dilantik tahun ini," pungkas mantan Kepala DPMPTSP dan Diskominfo Kaltim ini.

(aya / sk)



PERUMDAM TIRTA KENCANA
KOTA SAMARINDA

BAYAR AIR SEMAKIN MUDAH

LOKET SWASTA ONLINE

- BENGKURUNG
- BPR SEKAR KALTIM
- LOA BAKUNG
- KOPETEL
- RAMAYANI
- LEMBUSWANA
- BUMI SEMPAJA
- GN LINGAI
- TENGGAWANG
- DAMAI
- RAUDAH
- HARAPAN BARU
- SIMPANG PASIR
- ANGLUNG
- GERILYA
- KALI MANIS
- LEMPAKE
- SEI KAPIH

UNTUK INFORMASI & PELAPORAN PERMASALAHAN PDAM HUBUNGI:

HOTLINE
0541-2088100

WA
0811 5535 36

REKENING AIR ANDA DAPAT DI BAYAR MELALUI

ONLINE / ATM






mandiri syariaH BUK MEGA

***Penting**

- Khusus Pelanggan yang menunggak lebih 2 bulan, pembayaran hanya dapat dilakukan di loket UPW PERUMDAM Tirta Kencana terdekat
- PERUMDAM Tirta Kencana Kota Samarinda tidak melakukan penagihan ke rumah-rumah
- Pembayaran rekening air yang sah dilakukan di loket UPW PERUMDAM Tirta Kencana dan pembayaran loket PBOB mitra PERUMDAM Tirta Kencana Kota Samarinda
- Bayarlah rekening tepat waktu untuk menghindari denda dan pemutusan/penyegelan dari petugas
- Pembayaran yang Sah, dilakukan di semua loket atau bank yang bekerjasama dengan PERUMDAM Tirta Kencana Kota Samarinda

NEW NORMAL DENGAN PROTOKOL KESEHATAN COVID 19

 PERUMDAM TIRTA KENCANA

 PERUMDAM TIRTA KENCANA



Ali Rachman AS, ST
Direktur Teknik



Nor Wahid Hasyim, ST, MM
Direktur Utama



Yusfian Noor, SE
Direktur Umum

OPINI

Ritel Gulung Tikar, Siapa Bertanggung Jawab ?

Dampak pandemi telah menghantam dunia perekonomian menjadi porak-poranda. Lambannya menanggulangi pandemi mengakibatkan masyarakat memilih untuk tidak keluar rumah dan mengubah perilaku belanja masyarakat kepada belanja daring. Hal demikian menjadikan Banyak perusahaan gulung tikar, termasuk perusahaan ritel, semua menjerit dan tak mampu bertahan.

PT Hero Supermarket Tbk atau Hero Group menjadi perusahaan ritel terbaru yang akan menutup semua gerai hipermarket Giant per Juli 2021. Menurut rencana, lima gerai Giant akan diubah menjadi gerai baru perlengkapan rumah tangga IKEA, sementara gerai hipermarket Giant lainnya akan ditutup.

Langkah Hero Group mengikuti peritel besar lainnya yang sudah terlebih dahulu menutup sebagian atau semua gerainya akibat terimbas pandemi. Misalnya, PT Matahari Department Store yang menutup 25 gerai pada 2020 dan berencana kembali menutup 13 gerai tahun ini. Ada pula gerai ritelfashion Centro Department Store dan PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey, Kamis (27/5/2021), mengatakan, bisnis ritel telah memasuki titik nadir setelah satu tahun lebih terdampak pandemi.

Faktor utama yang mempengaruhi turunnya daya beli masyarakat adalah kondisi tidak stabilnya ekonomi negeri. Dan inilah terjadi di masa pandemi dimana terjadi defisit neraca perdagangan, akibatnya konsumsi pun melambat. Dan ritel-ritel pun tutup dan pengangguran makin banyak.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah mencatat, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,75 juta orang pada Februari 2021. Jumlah tersebut meningkat 26,26% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 6,93 juta orang.

Menteri Ketenagakerjaan

(Menaker) Ida Fauziyah menyebutkan ada 29,12 juta penduduk usia kerja terdampak pandemi Covid-19. Ia mengakui dampak pandemi berakibat pada jumlah pengangguran terbuka yang mencapai 9,77 juta orang.

Tingginya pengangguran dapat berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan, gizi buruk, kriminalitas, perceraian, dan sebagainya.

Akibat Sistem Ekonomi Kapitalis

Penurunan penjualan bisnis ritel merupakan salah satu gejala resesi ekonomi di suatu negara. Saat ini, gejala resesi menimpa hampir seluruh dunia, termasuk Inggris dan Amerika. Bahkan mulai dirasakan sejak tahun 2019.

Jika kita menilik sistem ekonomi kapitalisme yang kini menguasai dunia, resesi ekonomi merupakan hal yang berulang dan terjadi secara periodik. Ekonomi dalam sistem kapitalis digerakkan dalam dua sektor. Pertama, sektor keuangan (Moneter) seperti perbankan, pasar modal, pasar uang. Kedua, sektor riil yaitu aktivitas pertukaran barang dan jasa. Namun resesi yang terjadi selama dua tahun ini berbeda dengan resesi yang terjadi sebelumnya. Resesi yang terjadi sejak tahun 2019 terjadi karena aktivitas keuangan. Dan resesi tahun ini telah menghantam sektor riil.

Minimnya peran negara dalam sistem kapitalisme juga berperan besar atas kehancuran ekonomi dan berlarutnya pandemi yang berujung pada kesengsaraan rakyat. Sistem kapitalisme telah

Oleh: Rohayati, S.Pd
(Pemerhati Masalah Sosial Masyarakat)

melegalkan penanggulangan wabah di bawah korporasi multinasional yang tak memiliki kepentingan lain selain profit bagi perusahaannya.

Pada melihat SDA negeri ini yang melimpah tentunya mampu mengatasi pandemi. Akan tetapi, atas nama liberalisasi dan privatisasi ala sistem kapitalisme, seolah korporasi asing berhak memiliki sumber daya alam mana pun.

Sang tuan rumah seolah tak memiliki hak melarang asetnya diambil jika perampok datang untuk mengambil barangnya. Tuan rumah pun tak memiliki hak untuk melakukan negosiasi harga dan barang mana saja yang boleh diambil dan tidak. Semua ini bisa terjadi karena si tuan rumah hanyalah "boneka" yang disimpan sang perampok demi memuluskan kepentingan.

Kekayaan alam yang dikuasai oleh perusahaan asing menjadikan manfaatnya tak sampai pada umat. Kebutuhan rakyat jadi tak terpenuhi dengan tuntas dan layak.

Lihatlah tarif listrik yang terus naik, BBM, PDAM, hingga harga pangan pokok yang terus tinggi, semuanya adalah akibat sektor tersebut dikuasai oleh asing.

Ditambah APBN yang bertumpu pada pajak, sehingga pemerintah terus menyasar rakyat agar bayar pajak. Padahal, beban hidup rakyat sudah makin berat di tengah pandemi dan kebijakan yang tak berpihak pada mereka. Seperti UU Omnibus Law Cipta Kerja yang sangat terlihat keberpihakannya pada pengusaha.

Jelas saja keuangan negara tidak beres, jangankan untuk membayar pajak, untuk makan pun rakyat tak bisa memenuhinya dengan layak. Semua ini menyebabkan negara tak memiliki dana untuk menanggulangi pandemi, karena utang pun nyatanya digerogoti tikus-tikus hingga

tak tersisa. Akhirnya, rakyat dibiarkan sendiri mengurus urusannya. Wajar saja wabah makin menjangkiti.

Inilah derita hidup dalam sistem kapitalisme, pandemi tak mau pergi, kehidupan pun akan makin terimbit. Perusahaan ritel dan lainnya yang kolaps adalah ulah sistem yang bukan berasal dari pencipta.

Islam Mencegah Krisis Ekonomi

Dalam sejarah peradaban Islam pernah mengalami krisis namun beda penyebabnya. Sistem Islam tidak mengenal dan tidak diperbolehkan pengembangan sektor keuangan seperti ribawi dan aktivitas spekulatif lainnya. Maka krisis yang terjadi lebih disebabkan karena wabah atau bencana alam.

Ekonomi Islam perekonomian yang berbasis sektor riil, seperti pada QS Al-Baqarah: 275. Tidak ada dikotomi sistem riil dan sistem moneter. Sebab sektor moneter Islam bukan seperti sektor kapitalis yang isinya sektor maya.

Islam memandang kegiatan ekonomi hanya terdapat dalam sektor riil, seperti pertanian, industri, perdagangan dan jasa. Dari sektor inilah kegiatan ekonomi didorong untuk berkembang maju.

Hanya saja hukum kepemilikan produk (barang/jasa) dan transaksi dalam perekonomian Islam berbeda dengan perekonomian kapitalis. Individu diperbolehkan memperoleh kepemilikan sesuai dengan karakter harta yang memang dapat dimiliki individu. Hal ini merupakan pengakuan Islam akan fitrah manusia untuk mempertahankan hidupnya. Bahkan muslim yang meninggal dunia karena mempertahankan hartanya secara haq adalah mati syahid.

Kepemilikan individu dibatasi oleh kepemilikan negara dan kepemilikan

umum. Individu tidak boleh memiliki harta yang terkategorisasi harta milik negara dan harta milik umum. Adapun kepemilikan umum seluruh kekayaan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. untuk kaum muslim, sehingga kekayaan tersebut menjadi milik bersama. Individu-individu diperbolehkan mengambil manfaat dari kekayaan tersebut namun tidak boleh dimiliki secara pribadi.

Ada tiga jenis kepemilikan umum. Pertama, sarana umum yang diperlukan oleh seluruh warga negara untuk sehari-hari, seperti air, saluran irigasi, hutan, sumber energi pembangkit listrik dan lain-lain. Kedua, kekayaan yang asalnya terlarang bagi individu untuk memilikinya, seperti jalan umum, laut, sungai, danau, teluk, selat, lapangan, masjid dan lain-lain. Ketiga, barang tambang (sumber daya alam) yang jumlahnya melimpah baik berbentuk padat (emas atau besi), cair (minyak bumi atau gas alam).

Rasulullah SAW bersabda, *"Kaum muslim sama-sama membutuhkan tiga perkara: padang, air, dan api."* (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Tanpa aturan kepemilikan Islam pertumbuhan di sektor riil tidak memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara adil. Sebab peningkatan hasil ekonomi dan penguasaan sumberdaya terkonsentrasi di tangan pemilik modal. Sebaliknya semakin digenot pertumbuhan ekonomi eksploitasi terhadap masyarakat dan sumberdaya alam sekitar semakin besar. Pilar penting dari ekonomi Islam berikutnya adalah distribusi harta kekayaan oleh individu, masyarakat maupun negara.

Ekonomi Islam menjamin seluruh rakyat Indonesia terpenuhi semua kebutuhan dasarnya. Sistem ekonomi Islam menjamin seluruh rakyatnya dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya. Demikianlah solusi Islam mencegah krisis ekonomi. ***

OPINI



Berharap Perundingan Damai Langgeng, Faktanya Israel Masih Lenggeng Jajah Palestina

MENTERI Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, menegaskan pentingnya Palestina dan Israel kembali ke meja perundingan untuk mewujudkan perdamaian yang langgeng, menyusul pengumuman gencatan senjata di Gaza.

"Setelah gencatan senjata dilakukan, harus diberikan tekanan agar negosiasi segera dilakukan untuk menyelesaikan isu mendasar", kata Menlu Retno. Hal itu disampaikan dalam pengarahannya media secara virtual pada Jumat pagi waktu Jakarta, atau Kamis malam waktu New York. Pertemuan tertutup dengan sejumlah menteri luar negeri pada Kamis 20 Mei 2021.

Pandangan yang sama, menurut Retno, juga diutarakan oleh para menlu yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu agar tekanan internasional diberikan kepada Palestina dan Israel serta pihak-pihak terkait lainnya, untuk menangani isu utama yakni diakhirinya pendudukan agar kekerasan tidak terus-menerus berulang.

Israel Tetap Langgeng Jajah Palestina

Kecil harapan perjanjian damai Palestina dan Israel dapat langgeng. Meski warga



Palestina menyambut keruntuhan pemerintahan Benjamin Netanyahu, tetapi mereka meyakini pendudukan alias penjajahan Israel akan tetap langgeng di tanah Palestina.

Konflik Palestina dan Israel berkepanjangan. Tidak mungkin gencatan senjata, perjanjian damai, dan pengakuan dua negara dapat mengakhiri konflik.

Upaya gencatan senjata dan perjanjian damai yang diserukan oleh berbagai penguasa dunia Islam hanya menegaskan tiadanya pembelaan sempurna terhadap saudara muslim Palestina. Sama halnya dengan membiarkan zionis Israel tetap langgeng menjajah Palestina.

Sikap penguasa muslim menegaskan keengganan dunia Islam untuk mengirimkan bantuan militer dan memberi solusi untuk menghentikan pendudukan dan mengusir zionis dari bumi palestina. Penguasa dunia Islam hanya sekedar mengancam karena terlalu banyak dijerat oleh



Oleh:
Rahmi Surainah, M.Pd

negara adidaya di belakang Israel.

Khilafah Solusi Palestina

Tentu kecaman yang dilontarkan akan menggetarkan musuh jika umat Islam kembali berjaya dalam Kekhilafahan. Seperti di masa Kekhilafahan terakhir Turki Utsmani yang sikap dan kecamannya sangat menggetarkan musuh Islam.

Diceritakan Sultan Abdul Hamid 2 ketika berhadapan dengan tokoh zionis, berkata kepada *Theodore Hertzl*: "Sesungguhnya, saya tidak sanggup melepaskan kendati hanya satu jengkal tanah Palestina. Sebab tanah ini bukan milik pribadiku, melainkan milik kaum muslim. Mereka telah berjuang untuk memperolehnya dengan

darah mereka. Silakan Yahudi menyimpan kekayaan mereka yang miliaran itu. Jika pemerintahanku ini tercabik-cabik, saat itu baru mereka dapat menduduki Palestina dengan gratis. Adapun, jika saya masih hidup, meskipun tubuhku terpotong-potong, maka itu adalah lebih ringan daripada Palestina terlepas dari pemerintahanku."

Sikap dan kecaman penguasa dalam kekhilafahan membuat musuh Islam gentar. Makanya berbagai upaya mereka lakukan untuk meruntuhkan Daulah Khilafah. Benar saja, ketika Khilafah runtuh pada tahun 1924 di tangan agen Inggris keturunan Yahudi, Mustafa Kemal, Yahudi dengan segera menggerogoti Palestina, hingga detik ini.

Persoalan Palestina bagi umat Islam adalah persoalan agama. Tentu berbahaya bagi Israel dan negara di belakangnya membiarkan muslim memahami ini masalah agama. Oleh karena itu, berbagai framing yang dilontarkan agar kaum muslim terpecah dan tidak peduli.

Dunia Islam termasuk penguasa seharusnya peduli dengan nasib sesama muslim. Kekejaman zionis Israel harus dihentikan dengan mengusir mereka dari tanah Palestina.

Kirimkan bantuan militer dan senjata, pasti mereka kalah.

Persatuan umat Islam seluruh dunia dalam satu kepemimpinan akan menyelesaikan Palestina dan negara muslim lainnya yang tertindas. Usir penjajahan Israel yang langgeng di tanah Palestina, maka damai akan langgeng untuk Palestina dan negeri muslim lainnya.

Sebagaimana firman Allah Swt : "*Dan perangilah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah/kekufuran lebih berbahaya dari peperangan.*" (QS Al-Baqarah: 191).

Umat Islam seluruh dunia harus bersatu, bahu-membahu untuk merebut kembali tanah Palestina dari penjajah Yahudi Israel. Pasalnya, tanah Palestina adalah tanah kharajiyah milik kaum muslim di seluruh dunia.

Namun, perintah perang untuk mengusir Israel itu hanya bisa dilakukan oleh Khilafah Islam. Khilafahlah, sebagai satu-satunya pelindung umat yang hakiki melancarkan jihad terhadap siapa saja yang memusuhi Islam dan kaum muslim.

*Wallahu a'lam. ****
(Penulis alumni Pascasarjana Unlam, Banjarmasin, Kalsel)



Forkom BS Dukung Capaian Pengelolaan Sampah

SAMARINDA, Swara Kaltim

Setelah dilakukan Diskusi Publik dan Seminar bagaimana pengelolaan Bank Sampah oleh Pengurus Forum Komunikasi Bank Sampah (Forkom BS) se Kaltim Periode 2021-2024. Ke depan,

Forkom BS se Kaltim dapat mendukung capaian pengelolaan sampah di Benua Etam Kaltim. "Alhamdulillah pelantikan, seminar dan perumusan program Forkom BS telah dilaksanakan. Kami bersyukur, karena organisasi

ini akan mendukung pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada pemerintah pusat terkait capaian pengelolaan sampah di Provinsi Kaltim," sebut Kepala DLH Kaltim H EA Rafiddin Rizal usai menutup seminar dari rang-

kaian Pelantikan Forkom BS se Kaltim, di Gedung Office Tower Golden Tulip Balikpapan, Rabu (9/6/2021).

Bagi Rizal sapaan akrab EA Rafiddin Rizal, pengelolaan sampah juga telah tertuang dalam Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pelaksanaan aturan ini selalu dimonitor

KLHK agar Kaltim selalu melaporkan informasi tersebut.

"Karena itu, keberadaan Forkom BS dapat mendaftar berapa besar capaian pengelolaan sampah di Kaltim. Pemerintah daerah yakin masyarakat akan sadar pentingnya pengelolaan sampah dengan baik..

"Artinya, bisa disadarkan ke masyarakat bahwa sampahku adalah tanggungjawabku bukan orang lain," jelasnya.

(aya / sk)

Tiga Besar Lomba Desa dan Kelurahan 2021 Ditetapkan

SAMARINDA, Swara Kaltim

Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan (Lomdeskel) 2021 se Kaltim terus berproses. Kini, ditetapkan tiga besar desa dan kelurahan yang akan melaju ketahapan lomba selanjutnya.

Penetapan tersebut, berdasarkan rapat penetapan yang dipimpin Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim HM Syirajudin bersama Tim Penilai, di Ruang Kepala DPMPD Kaltim, Senin (7/6/2021).

Tiga desa dimaksud Kampung Sumber Agung, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau. Desa Segandang, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser serta Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Sedangkan tiga kelurahan yakni Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang. Kelurahan Sumber Rejo, Kelurahan Balikpapan

Utara, Kota Balikpapan serta Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda.

M Syirajudin mengatakan, mereka yang masuk tiga besar akan lanjut ke tahap pemaparan/presentasi yang akan dilaksanakan 15 Juni 2021 untuk Desa dan 16 Juni 2021 untuk Kelurahan. "Selamat bagi desa dan kelurahan yang sudah berhasil lolos ke tiga besar. Silahkan persiapkan presentasi terbaik terkait terobosan desa dan kelurahan untuk merebut kesempatan menjadi terbaik Lomdeskel 2021," sebut Iyad sapaan akrab M Syirajudin didampingi Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kasmawati.

Kepala Desa/Kampung dan Lurah nantinya berperan sebagai presenter saat sesi presentasi.

Presenter tidak boleh diwakilkan dan didampingi DPMD/sebutan lain atau OPD

Kabupaten/Kota yang membina urusan penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2021.

"Mereka diwajibkan menghadirkan unsur Camat, Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kampung dan Kelurahan, Ketua LPM (Desa/Kampung dan Kelurahan), dan Ketua BPD (Desa/Kampung)," tegasnya.

Pengumuman Juara Perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan Tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2021.

Pemenang Lomba Desa/Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kaltim mendapatkan penghargaan berupa uang pembinaan yang penyerahannya akan disampaikan kemudian dan Piagam Penghargaan akan diserahkan pada saat acara peringatan HUT Provinsi Kaltim pada bulan Januari 2022 mendatang.

(aya / sk)

ELTY Spa
...relaxing, rejuvenating your body.....

massage treatment

....new treatments
....new therapist

treatment menu & price		
- traditional massage	60'	idr. 300.000/net
- aromatic massage	90'	idr. 400.000/net
- full body massage	120'	idr. 500.000/net

hotel grand elty singgasana
jl. pahlawan no. 1 tenggarong
kutai kartanegara, east kalimantan
p. 0541 664705 | f. 0541 664709
email. sales1.ges@eltyhotels.com
www.grandeltyhotel.com

sms RESERVATION: 0811 58 2324



Apa yang Pertama Kali Ditanyakan kepada Wanita pada Hari Kiamat ?

SUBHANALLAAH, betapa sayangnya Allah Swt terhadap kaum wanita.

1. Doa seorang isteri yang taat memiliki kekuatan 70 wali.

2. Isteri yang membuatkan minum suami tanpa diminta, pahalanya 3 x khatam Al-Qur'an.

3. Masakan isteri yang

dilakukan secara sunah dan dimakan suami beserta keluarga pahalanya semua untuk isteri dan do'a suami yang memakan masakannya menjadi do'a yang diijabah (dikabulkan).

4. Isteri yang membanjirkan suaminya untuk shalat atau mengingatkan untuk melaksanakan ibadah shalat berjamaah di

Qatadah rahimahullah mengatakan bahwa Ka'ab radhiyallahu 'anhu berkata:

أول ما تسأل عنه المرأة يوم القيامة عن صلاتها، وعن حق زوجها.

"Pada hari kiamat nanti, yang pertama kali akan ditanyakan kepada seorang wanita adalah tentang shalatnya dan hak suaminya (kewajiban istri terhadap suami, apakah dijalankan dengan baik atau tidak)."

(al-Mushannaf karya al-Imam Abdur Razzaq 11/304)



Tempat kediaman kita, meskipun itu sebuah rumah sederhana.. tetap adalah istana kita, tempat kita pulang, tempat kita berbagi kebahagiaan dan kedamaian bersama orang-orang yang kita cintai.

Di tempat itulah kita merasa bebas dan terlindungi serta menjadi tempat kita menuangkan segala kasih sayang, perhatian, hasil kreasi, dan bahkan kekesalan kita.

Bagi seorang suami, kantung rumah adalah seorang isteri, jika hati isterimu tidak bahagia, maka seisi rumah akan tampak seperti neraka (tidak ada canda tawa, manja, perhatian), maka sayangi isterimu agar dia bahagia dan kau akan merasa seperti di surga.

Semua kebahagiaan hakiki sebenarnya berasal dari tempat kediaman kita. Jadikan rumah tangga kita sebagai "Baiti Jannati" rumahku surgaku, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam QS.Al-Furqan [25]: 74):

"Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."

masjid pahalanya 27+1

5. Isteri yang kelelahan bangun malam karena anaknya minta susu sama dengan pahala 70 x haji mabrur.

6. Seorang ibu yang menyusui setiap tetes sunya senilai 200 x shalat khusus dan doanya diijabah (fadilah wanita).

7. Burung di udara dan malaikat di langit akan selalu memintakan ampunan kepada Allah selama isteri dalam keridhoan suami.

8. Bila seorang suami pulang dengan gelisah dan isteri menghiburnya maka isteri mendapatkan 10 pahala jihad.

9. Bila seorang wanita hamil shalatnya dua rakaat adalah lebih baik dari 80 rakaat shalat wanita yang tidak hamil.

10. Bila seorang wanita hamil akan mendapatkan pahala 70 tahun shalat dan 70 tahun puasa.

11. Wanita yang mencuci pakaian suami dan anak-anaknya akan mendapat 1.000 kebaikan dan akan diampuni kesala-

hannya, bahkan segala sesuatu yang disinari matahari memintakan ampun baginya dan Allah Swt mengangkat derajatnya 1.000 tingkat.

12. Wanita yang menyusui anaknya, maka setiap tetesan air susu tersebut akan mendapatkan 1 pahala dan apabila cukup 2 tahun menyusui maka malaikat di langit akan mengabarkan berita bahwa surga wajib baginya.

13. Apabila seorang wanita datang haid maka haidnya akan menghapus dosa-dosanya.

14. Apabila ia membaca doa pada hari pertama keluar haid "Alhamdu-lillahi ala kullu halin wa astagfirullah min kulli zanbi" Maka Allah Swt akan membebaskannya dari neraka jahanam, shirat dan adzab.

15. Setiap hari dari haidnya, Allah tinggikan dia dengan pahala 40 orang mati syahid apabila ia berdzikir. **(dari berbagai sumber / *Bn)**



Olahraga



Barito Putera jadi Lawan Terakhir di Agenda TC Borneo FC

PELAN-PELAN Borneo FC menghadapi tantangan berat dalam uji coba selama pemusatan latihan di Yogyakarta.

Usai bertemu Persita Tangerang, pada 12 Juni mendatang lawan sesama peserta Liga 1 lainnya akan dihadapi di lapangan Universitas Negeri Yogyakarta. Tim tersebut adalah Barito Putera.

Ini jelas akan jadi lebih berat, karena secara kualitas pemain Barito Putera yang diarsiteki Djajang Nurjaman, sedikit lebih baik dibandingkan Persita.

Selain itu, kematangan tim berjuluk Laskar Antasari tersebut juga akan jadi ujian tersendiri bagi Borneo FC.

Asisten pelatih Ahmad Amiruddin mengatakan, melawan Barito Putera menjadi ujian berat bagi timnya. Sebab Barito Putera punya kedalaman skuad bagus dibandingkan Persita.

"Persita adalah tim kuat. Tetapi secara tradisi Barito Putera bisa dikatakan lebih kuat," ujar Amir.



Persita sendiri adalah tim yang musim lalu baru promosi di Liga 1. Sementara Barito Putera selama ini tak pernah terlempar dari persaingan Liga 1, bahkan sejak era perserikatan.

"Yang jelas pemain harus lebih siap diuji coba nanti. Kami sih berharap Jonathan Bustos sudah fit, agar tim tampil dengan kekuatan komplet," tambahnya.

Para pemain sendiri kemarin mendapatkan porsi latihan berbeda.

Pemain yang diturunkan

melawan Persita, hanya melakukan latihan ringan di lapangan. Sementara pemain lain mendapatkan program lebih berat.

"Yang tak bermain lawan Persita kami drill secara khusus, terutama dibagian penyelesaian akhir. Sebab di sektor depan adalah kelemahan paling utama tim ini ketika uji coba. Banyak peluang, tetapi sulit dijadikan gol," beber Amir.

Namun Amir menegaskan dari hasil uji coba selama ini, tim pelatih jadi lebih mengetahui kelemahan tim secara keseluruhan.

Hal paling mencolok memang ada di depan, tetapi Mario Gomez sebagai pelatih kepala, punya catatan-catatan lain di semua posisi.

"Ini sudah menjadi catatan kami dari tim pelatih sepanjang uji coba di Yogyakarta. Nantinya kami harap saat lawan Barito Putera lini depan jauh lebih tajam dan bisa memanfaatkan peluang menjadi gol," pungkas Amir. (*)

Indonesia Tolak Usulan Penundaan SEA Games 2021

INDONESIA menyampaikan penolakannya terhadap usulan tuan rumah untuk menunda SEA Games 2021 Vietnam hingga tahun 2022 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Raja Sapta Oktohari dalam Rapat Kerja SEA Games Federation (SEAGF) yang berlangsung virtual, Rabu.

"Kami keberatan jika SEA Games ke-31 ditunda ke 2022 karena anggaran SEA Games tahun ini sudah dialokasikan dan harus ada pertanggungjawaban anggarannya," ujar Oktohari dalam keterangan tertulisnya.

"Jika ditunda ke 2022, pengajuan anggaran tahun depan belum ada. Selain itu, penundaan mengakibatkan SEA Games berikutnya di Kamboja pada 2023 hanya berselang satu tahun," kata dia menambahkan.

Okto, sapaan akrabnya, menghadiri rapat kerja yang dipimpin oleh Chief Operating Officer SEAGF Datuk Seri Chaiyapak Siriwat.

Rapat kerja dibuka dengan penetapan notulen rapat tera-

akhir pada 18 Mei yang dilanjutkan dengan paparan situasi terkini dari tuan rumah Vietnam.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan komite olimpiade nasional (NOC) Vietnam menyampaikan keinginan untuk menunda SEA Games edisi ke-31 ke pertengahan tahun depan karena peningkatan jumlah kasus COVID-19 di negaranya.

Vietnam mengusulkan pesta olahraga dua tahunan se-Asia Tenggara itu untuk dilaksanakan pada pertengahan Mei atau Juni 2022.

Namun tujuh dari 11 negara peserta SEAGF, yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand menolak usulan tersebut.

Myanmar menjadi satu-satunya negara yang menyatakan setuju dengan usulan penundaan tersebut, sedangkan Laos dan Timor Leste mengikuti apa pun keputusan yang ditetapkan SEAGF.

Ketujuh negara yang menolak menilai penundaan SEA Games hingga tahun depan bakal mengakibatkan kalender multi-

event olahraga semakin padat, dan dikhawatirkan atlet tidak dapat tampil maksimal.

Pada 2022, Indonesia setidaknya bakal mengikuti tiga multi-event olahraga, yaitu Asian Indoor Martial Arts Games (AIMAG) Bangkok, Islamic Solidarity Games (ISG) Konya, serta Asian Games Hangzhou.

"Semua atlet, pelatih, hingga official Indonesia sudah divaksin dan masih ada waktu lima bulan lagi untuk merealisasikan SEA Games Hanoi berlangsung tepat waktu. Olimpiade 2020 Tokyo juga masih sesuai jadwal dan kita bisa mengadopsi protokol kesehatan untuk diterapkan saat SEA Games. Jika tuan rumah menghadapi kesulitan, kami rasa semua negara ASEAN tentu akan saling membantu," ujar Okto.

Menanggapi penolakan dari mayoritas negara peserta SEAGF, NOC Vietnam meminta waktu untuk berdiskusi dengan pihak pemerintah untuk menentukan langkah selanjutnya terkait nasib SEA Games. SEAGF akan kembali mengadakan rapat lanjutan pada 24 Juni 2021. (ant)

Cattleya Spa

promotion

price starting: **idr.250.000**
60 minutes

get attractive discount

open: 10 am - 12 pm
ext: 1 / 0

...relaxing, rejuvenating
your body

only at : **Elty Smart Lesong Batu**

sms reservation: 0811 58 2324

hospitality with heart



SOCCER MANIA



Chelsea Saingi Tawaran PSG untuk Gaet Achraf Hakimi

PARIS ST. GERMAIN Tidak sendiri dalam mengejar pemain bertahan Inter Milan, Achraf Hakimi. Chelsea berani menyamai tawaran PSG untuk Hakimi.

Hakimi menjadi salah satu pemain kunci yang akan dilego Nerazzurri demi mendapatkan suntikan dana. Sekalipun Inter baru saja memenangi gelar juara Liga Italia 2020/2021, Scudetto pertama klub dalam 11 tahun.

Inter kekeh membanderol pemain internasional Maroko itu seharga 80 juta euro (sekitar Rp 1,39 triliun). Sedangkan PSG belum lama ini dikabarkan telah menjalin kesepakatan untuk menggaet Hakimi setelah menawarkan 60 juta euro. Klaim yang dibantah agen si pemain. "Tidak ada negosiasi dengan PSG, tidak ada apa pun saat ini. Kami tidak memiliki kesepakatan



dengan klub Prancis itu mengenai kesepakatan personal. Dia bahagia di Inter," ungkap

Alejandro Camano. Chelsea kini bersaing dengan PSG dalam perebutan

mantan pemain Real Madrid itu. *Sky Sport Italia* melaporkan, *The Blues* juga bersedia

membayar transfer Hakimi senilai 60 juta euro.

Namun, Inter Milan disebut lebih tertarik melepas Hakimi ke London karena Chelsea turut memasukkan Emerson Palmieri di dalam tawarannya. Hanya saja ada perbedaan minat di antara kedua klub; Inter maunya meminjam Emerson saja, sedangkan Chelsea lebih memilih kepindahan permanen.

Hakimi bersinar terang bersama Inter pada musim lalu dengan torehan tujuh gol dan 10 assist di Serie A. Pemain berusia 22 tahun itu juga bisa dimainkan sebagai full-back di kedua sayap dalam pertahanan konvensional empat bek. Kepiawaian Achraf Hakimi dipandang pas untuk sistem yang diusung Manajer Chelsea Thomas Tuchel, yang kerap menerapkan lima bek di belakang. **(dts)**

Lautaro Tolak Kontrak Baru dari Inter Milan

LAUTARO MARTINEZ menolak tawaran kontrak baru dari Inter Milan. Tapi, bukan berarti Lautaro akan meninggalkan Nerazzurri musim panas ini. Lo, kenapa?

Setelah memastikan jadi juara Liga Italia, Inter memang diganggu kondisi finansial yang mengharuskan mereka berhemat. Salah satunya adalah dengan menekan gaji pemain.

Sejauh ini baru Andrea Bastoni yang menekan kontrak baru dengan Inter. Sementara yang paling ditunggu adalah Lautaro yang sejatinya masih punya masa tinggal hingga 2023.

Namun, isu seputar kepindahan Lautaro kencang beredar karena Inter membutuhkan dana segar untuk membayar utang.

Lautaro dianggap sebagai aset berharga yang bisa menghasilkan uang, selain Achraf Hakimi.

Paris Saint-Germain, Barcelona, dan Manchester United kabarnya berniat memboyong pemain asal Argentina itu. Inter kabarnya siap melepas



Lautaro jika ada tawaran sesuai klausul kontraknya, 110 juta euro.

Di satu sisi, Inter sebenarnya ingin mempertahankan Lautaro dengan menyodorkan kontrak baru hingga 2024 tanpa menyertakan klausul. Nah, tawaran ini rupanya ditolak oleh pihak Lautaro.

Sebab, Lautaro sudah puas dengan pendapatannya di Inter saat ini, sekitar 4,5 juta euro per musim dan belum ada keinginan untuk teken kontrak baru.

Ini bisa jadi pedang bermata dua, antara Lautaro memang setia atau dia

menunggu tawaran tepat dari klub peminat.

"Jumlah itu masih terlalu jauh," ujar agen Lautaro Martinez, Alejandro Camano, soal tawaran 90 juta euro dari Barcelona.

"Semua pemain punya harga, dan meski Inter tidak pernah membicarakan soal penjualan Lautaro, kita harus melihat bagaimana situasi klub di tengah bursa transfer ini," sambungnya seperti dikutip *Football-Italia*.

"Mereka menawarkan kontrak baru, tapi kami bilang kami sudah cukup puas dengan yang ada saat ini." **(dts)**

Smart People. Smart Stay
ZOOM
HOTELS

Sunset Tea
Enjoy every sunset with best view Mahakam river, while enjoying high quality afternoon snack and tea

All You Can Eat
IDR 55,000
Nett/Person

Monday - Friday,
4 pm - 8 pm

Call us! 0541 737363 | Whatsapp 0811 5596 889

Follow us @zoomhotelmulawarman_official

Alamat Jl. Mulawarman No 38 Pelabuhan Samarinda kota Kalimantan Timur 75242

Inspired by:
CYRAS
CORPORATION

Ekonomi & Bisnis

BPDLH Siap Dampingi Kaltim Kelola Dana *World Bank*

SAMARINDA, Swara Kaltim

Sebagai wujud pelaksanaan pembangunan hijau maupun penurunan emisi carbon khususnya dalam penyelenggaraan Program Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (Forest Carbon Partnership Facility/FCPF-Carbon Fund) dari Bank Dunia (World Bank), yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur dengan alokasi USD 110 juta atau Rp1,5 triliun untuk program pengurangan emisi 22 juta ton CO₂e selama periode tahun 2020-2024.

Maka, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan RI siap mendukung dan mendampingi proses pengelolaan dana tersebut.

Direktur Penghimpunan dan Pengembangan Dana Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan RI Endah

Tri Kurniawati sebagai narasumber webinar sosialisasi peran BPDLH dan mekanisme pengajuan pembiayaan menegaskan BPDLH siap membantu Pemprov Kaltim dalam pelaksanaan tersebut.

"Diperlukan ketelitian Pemprov Kaltim dalam pengelolaan dana tersebut. Termasuk, dalam pengawasan dan fasilitasi kegiatan akan dilakukan oleh BPDLH. Kami siap bantu," sebut Endah Tri Kurniawati ketika zoom meeting webinar sosialisasi peran BPDLH dan mekanisme pengajuan pembiayaan oleh DDPI Kaltim, Kamis (10/6/2021).

Menurut Nia sapaan Endah Tri Kurniawati, saat ini adanya program penurunan emisi carbon yang didukung Bank Dunia atau World Bank bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan



Zoom Meeting Webinar Sosialisasi Peran BPDLH dan mekanisme pengajuan pembiayaan oleh DDPI Kaltim, Kamis (10/6/2021).

Kehutanan.

Maka, pengelolaan dana itu tetap akan dilakukan audit bersama BPK RI.

"Untuk semua Hibah World Bank akan diaudit sewaktu-waktu jika memang ada

masalah dalam pelaksanaannya. Tapi, BPDLH tetap aman mendampingi, jadi jangan khawatir," jelasnya.

Ketua Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Provinsi Kaltim Daddy Rukhiyat

menyebutkan, Kaltim menjadi satu-satunya provinsi terpilih di Indonesia untuk program penyelamatan hutan dari deforestasi dan degradasi hutan. Kaltim menjadi pilot project program ini di Indonesia.

Peluang besar untuk memperoleh pembayaran berbasis kinerja hingga USD 110 juta dari negara-negara donor melalui Bank Dunia sebagai kompensasi bila Kaltim mampu mengurangi 22 juta ton emisi gas rumah kaca (GRK) selama lima tahun ke depan.

"Dukungan pendanaan menjadi kunci utama dalam pelaksanaan pembangunan hijau maupun penurunan emisi carbon khususnya dalam penyelenggaraan program FCPF-CF tahun 2021 dapat terlaksana dengan baik," jelasnya.

Hadir Kepala DPMPD Kaltim HM Syirajudin dan OPD terkait Lingkup Pemprov Kaltim. (aya / sk)

DPR RI Sampaikan Keluhan Pengusaha Urus Perizinan Masih Berbelit-belit

JAKARTA, Swara Kaltim

Anggota Komisi VI DPR RI La Tinro La Tunrung menyampaikan pengaduan sebagian pengusaha yang mengeluhkan mengenai izin usaha yang dipersulit dan masih berbelit-belit hingga saat ini.

La Tinro La Tunrung dalam keterangan persnya diterima di Jakarta, Rabu, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Investasi dan BKPM Bahlil Lahadalia.

"Banyak pengusaha mengeluh, ada yang izinnya sudah puluhan tahun tidak bisa keluar," kata dia.

Dia menjelaskan permasalahan pertama yang ada dalam pengurusan izin tersebut adalah aturan yang selalu berubah-ubah.

"Sudah memutuskan aturan yang lain berubah lagi aturan yang lain, orang sudah menyiapkan seluruh berkasnya berubah lagi aturan yang lain. Ini kan jadi problem untuk semua," katanya lagi.

Menurut dia, Kementerian

Investasi itu muncul untuk bisa memberikan pelayanan dan koordinasi dengan lembaga-lembaga kementerian lain, sehingga izin usaha para pengusaha itu tidak dipersulit.

"Mohon melakukan koordinasi sebagai eksekutor, sehingga suatu izin bisa dipermudah dan dipercepat," kata dia pula.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Gde Sumarjaya Linggih atau yang akrab disapa Demer membenarkan apa yang terjadi di lapangan.

Ia setuju dengan La Tinro La Tunrung.

"Karena saya juga sempat mengalami hal ini, kami sudah siapkan semuanya, investasi mau masuk, tempatnya juga sudah siap, namun karena persoalan rekomendasi yang ada di bawah jadilah ditunda-tunda perizinan kami," kata dia.

Demer juga mengatakan tugas dan tanggung jawab BKPM yang mulanya kurang, kewenangannya kini dit-

ambah.

"Semoga menjadi lebih leluasa bergerak," kata politisi asal Bali tersebut.

Sejalan dengan masukan DPR, Menteri Investasi dan BKPM Bahlil Lahadalia membenarkan masih adanya oknum yang memanfaatkan proses perizinan usaha untuk kepentingan tertentu.

"Apa yang bapak/ibu rasakan tentang izin di daerah masih susah dan putar-putar, itu juga yang saya rasakan ketika saya pertama jadi pengusaha," katanya.

Hal itu menurutnya adalah potret dari sebuah sistem birokrasi di negara ini. Oleh karena itu, Undang-Undang Cipta Kerja dibuat dengan tujuan bagaimana dunia usaha mendapatkan kepastian perizinan dan kemudahan.

Lebih lanjut, untuk efisiensi dan transparansi Pasal 174 UU Cipta Kerja dikatakan bahwa kewenangan gubernur, bupati, dan kementerian lembaga terkait dalam konteks izin dimaknai sebagai kewenangan

presiden yang dilimpahkan pada mereka.

"Seluruh perizinan usaha nantinya akan berbasis online dan pelayanan modal satu pintu," katanya.

Kementerian Investasi & BKPM terbilang kementerian

yang memang baru dibentuk oleh Presiden Joko Widodo. Saat ini Indonesia memerlukan adanya investasi, utamanya investasi asing guna menyeimbangkan neraca dan mewujudkan kesejahteraan dalam jangka panjang. (ant)

STAY CATION deluxe room promo
IDR 650.000,-
IDR 418.000,- /night
* include breakfast for 2 person
* free voucher disc. Kartika Spa & Sevendays Bar

0811 581 3669
0541 735 776
www.hotelgrandkartika.com
CHSE Certified

OPINI

PNS Misterius, Kelalaian Birokrasi dan Perampokan Uang Rakyat

Sebanyak 97 ribu data PNS misterius, atau kata lainnya PNS "siluman", sejak 2015 masih menerima gaji dan dana pensiun. Bukan negeri +62 namanya jika tak mengeluarkan seribu macam alasan.

BERDASARKAN hasil Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) yang dilakukan pada September-Desember 2015, Badan Kepegawaian Negara merilis penjelasan mengapa 97 ribu PNS tidak terekam datanya.

Menurut BKN, tidak terekamnya data disebabkan mengalami kesulitan akses melakukan pendaftaran ulang, status mutasi, status meninggal, status berhenti, atau sejenisnya, yang tidak dilaporkan oleh instansi kepada BKN.

Namun, apakah hal ini dibenarkan? Bertahun-tahun lamanya, hingga tahun 2021 kembali mencuat puluhan ribu PNS "siluman" tetap digaji oleh negara. Bukankah ini dinamakan perampokan uang rakyat secara sistematis?

Sudah menjadi rahasia umum jika negeri +62 selalu bermasalah dengan database. Ini yang menyebabkan pemerintah sering salah sasaran memberikan dana Bansos, atau kini negara merugi karena menggaji puluhan ribu PNS yang tiada wujudnya.

Hal ini adalah musibah terbesar dalam penataan kepegawaian di negeri ini. Akibatnya, negara telah "dirampok" hingga triilunan rupiah. Asumsinya, jika satu orang PNS berpangkat III/A menerima gaji pokok Rp2 juta per bulan, potensi kerugian negara hampir Rp2,5 triliun per tahun. Ini sebagaimana disampaikan anggota Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda. Kelalaian ini adalah dalam hal birokrasi hingga uang rakyat raib secara percuma dan hal ini terjadi saat krisis keuangan negara akibat dampak Covid-19 belum teratasi.

Benarkah Ada Kolusi dengan Birokrasi ?

Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Amanat Nasional, Guspari Gaus, menduga terjadi kolusi yang menerima gaji dan iuran pensiun. Tidak menutup kemungkinan terjadi persekongkolan sejumlah pihak dalam kasus puluhan ribu PNS fiktif.

Hal senada disampaikan



Oleh : Emirza, M.Pd

anggota Ombudsman RI, Alvin Lie. Ia geram dan mengatakan duit negara dipakai untuk bayar gaji PNS bodong selama puluhan tahun, sementara rakyat terus dibebani berbagai biaya dan pajak. Lemahnya sistem pemutakhiran data tentu akibat kelalaian yang terjadi berulang-ulang. Tidak ada koreksi, apalagi evaluasi. Jika sudah sejauh ini cara pemerintah menata kepegawaiannya, publik patut mempertanyakan kinerja pejabat pemerintahannya. Bukankah mereka diangkat menjadi PNS guna berkontri-

busi nyata untuk mengurus rakyat? Bukan hanya terdata lalu mendapat gaji, atau yang sering disebut makan gaji buta. Betapa memalukan dan menunjukkan betapa lemah dan amburadulnya manajemen kepegawaian. Jika memang nanti terbukti telah terjadi kolusi dengan birokrasi, makin menunjukkan bobroknya sistem birokrasi dalam sistem demokrasi.

Mekanisme Kepegawaian dalam Khilafah

Sangat jauh berbeda

dalam sistem Islam. Seluruh pegawai yang bekerja pada sistem pemerintahan Khilafah diatur sepenuhnya di bawah hukum-hukum ijarah (kontrak kerja). Mereka mendapatkan perlakuan adil sejalan dengan hukum syariat.

Hak-hak mereka sebagai pegawai, baik pegawai biasa maupun direktur, dilindungi Khilafah. Para pegawai bekerja sesuai dengan bidang masing-masing, memperhatikan hak dan kewajiban mereka sebagai pegawai negara maupun sebagai rakyat.

Sebagai pegawai, mereka bertugas melayani urusan-urusan rakyat sesuai dengan tugas dan fungsi mereka di masing-masing departemen, jawatan, dan unit. Mereka tidak dibebani dan dituntut melakukan tugas-tugas di luar tugas yang telah diakadkan dalam akad ijarah.

Sementara itu, dalam posisi mereka sebagai rakyat, Khilafah akan melayani dan memperlakukan mereka secara adil, sehingga apa yang menjadi hak mereka terpenuhi secara sempurna.

Rekrutmen kepegawaian, deskripsi dan pembagian tugas, serta pemaparan hak dan kewajiban, telah tergambar jelas pada setiap pegawai negara. ***

SAMBUNGAN

Wali Kota

sebut Andi Harun, tetap berjalan namun tidak otomatis membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kehilangan fokus dalam pekerjaan utama seperti penanganan banjir serta penataan tata kota berupa penataan parkir, penataan pasar, penataan kebersihan dan pelayanan air bersih.

Termasuk dalam konteks menyelesaikan masalah penangan Kota Samarinda.

"Untuk saat ini baru penyusunan masterplan. Pembangunannya bisa saja di periode yang akan datang dan bisa saja

bukan kami lagi Wali Kota dan Wakilnya," tutur Andi Harun.

Tak hanya membahas pengembangan wisata Sungai Mahakam, tetapi juga membahas tentang program 100 hari kerja Wali Kota Samarinda.

Wawali Rusmadi menambahkan, warga Samarinda patut bersyukur karena diberikan kekayaan berupa Sungai Mahakam yang tidak dimiliki daerah lain.

Menurut dia, penataan Sungai Mahakam ke depan perlu didesain agar tetap berfungsi

si optimal baik dari segi lingkungan maupun secara ekonomi.

Karena kata dia, sejak dahulu aktivitas ekonomi di Kaltim memang tidak bisa terlepas dari

Berkedok

tanam melalui DM. Padahal menurut Ferry kalau dipikir secara akal sehat, jenis usahanya saja tidak jelas, tetapi masih ada saja masyarakat yang mau mendapatkan uang dengan cara instan. Untuk di Kabupaten Berau, sudah ada 6 orang saksi

sungai.

"Kemudian bicara masalah sungai, pasti tidak terlepas dari bantaran. Intinya jangan sampai lepas dari fungsi lingkungan dalam hal ini RTH (Ruang

yang diperiksa, sedangkan korban tidak sampai 10 orang.

"Jika kita berbicara investasi bodong ini, artinya koordina-tornya mainnya gali lobang tutup lobang. Artinya saat awal, pesertanya dimanjakan dengan nilai investasi sesuai

Terbuka Hijau, - Red.) yang perlu dijaga. Sehingga bisa membuat warga nyaman ketika ingin menikmati ruang publik di Tepian Mahakam. Tidak bikin *sumpek*," ungkapny. (dho)

Dari Halaman 1

Dari Halaman 1

yang dijanjikan, namun saat sudah terkumpul banyak modalnya, uang peserta dibawa kabur dengan dalih macet, sama dengan kasus DM ini yang macet di bulan Mei 2021," pungkas Kasat Reskrim Polres Berau AKP Ferry Putra Samodra. (nht / ***)

Jembatan Achmad Amins Kini Bisa Dilintasi

SAMARINDA, Swara Kaltim

Sesuai janji sehari sebelumnya, Jembatan Mahkota II atau yang kini resmi berganti nama menjadi Jembatan Achmad Amins itu dibuka untuk kendaraan umum, Kamis (10/6/2021) siang.

Ya, jembatan yang menghubungkan Kelurahan Sungai Kapih di Sambutan dengan Kelurahan Simpang Pasir di Palaran yang sempat ditutup selama 45 hari itu telah resmi dibuka kembali oleh Wali Kota Samarinda Dr H Andi Harun didampingi Wakil Wali Kota (Wawali) Dr H Rusmadi.

Dibukanya kembali jembatan itu, setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Jenderal Bina Marga. Tentunya, itu sudah melalui pengukuran teknis berupa pengukuran pilar, kabel, maupun pengukuran retak jembatan yang kemudian dinyatakan aman untuk dilintasi kendaraan.

Namun meski jembatan sudah bisa dilewati warga, Wali Kota Samarinda Dr H Andi Harun tetap meminta ada pembatasan jenis kendaraan demi



Wali Kota Samarinda Andi Harun bersama isteri wali kota Samarinda periode 2000-2005 dan 2005-2010 Hj Aminah Amins saat pembukaan kembali jembatan Achmad Amins eks Mahkota II.

pertimbangan keamanan ke depan.

"Meski sudah dinyatakan aman, saya tetap memberlakukan pembatasan. Saya sudah koordinasikan dengan Dishub (Dinas Perhubungan, Red) dan bekerja sama dengan Polresta Samarinda untuk melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap kendaraan yang diperbolehkan.

Kendaraan yang tidak boleh melintas adalah semua jenis truk dan kendaraan angkutan umum. Yang diperbolehkan hanya angkutan roda dua dan roda empat yang bersifat pribadi. Diskresi atau pengecualian di area ini seperti ambulance dan kendaraan roda tiga pengangkut sampah," tegas Dr H Andi Harun.

Jembatan nantinya akan

dibuka secara total lanjut Wali Kota, setelah pembangunan pengamanan jembatan dari sisi pylon 7 Teluk Bajau yang akan dipertimbangkan oleh Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Bina Marga.

"Untuk pembuatan pengamanan jembatan, membutuhkan biaya kurang lebih Rp50 miliar yang selanjutnya akan kita koordinasikan dengan

Dinas PUPR Provinsi kemudian Kementerian PUPR agar kita bersinergi untuk menyediakan alokasi anggaran buat perawatan jembatan. Tidak hanya Jembatan Achmad Amins, tetapi juga jembatan yang berada di seluruh Kota Samarinda," ujar Wali Kota.

Untuk membatasi kendaraan yang melintas di area Jembatan Achmad Amins, Dishub Kota Samarinda memasang beberapa barrier beton dan menyisakan ruang selebar kendaraan roda empat.

Wali Kota berharap agar warga bisa saling bekerja sama untuk memahami kebijakan Pemkot Samarinda yang membatasi kendaraan yang melintas ini.

"Yang terpenting kesadaran bagi para pemilik kendaraan untuk tidak memaksakan diri apabila tidak memenuhi kriteria. Khususnya para pengendara truk dan kendaraan umum. Kita sama-sama menjaga Jembatan Achmad Amins ini untuk tetap menjadi jembatan penyeberangan yang bisa dinikmati oleh seluruh warga Kota Samarinda untuk jangka panjang," pesan Wali Kota. **(kmf)**

Laskar Kalimantan Bersatu Bantu Korban Kebakaran Gunung Bugis Balikpapan



Buyung Boim
Sekretaris DPC LAKAS
Kota Balikpapan.

BALIKPAPAN, Swara Kaltim

LAKAS (Laskar Kalimantan Bersatu) Kota Balikpapan memberikan bantuan bahan pokok kepada 44 Kepala Keluarga (KK), 155 jiwa di RT. 02, RT.03, dan RT.04 warga korban kebakaran Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Sabtu (5/6/21) ke posko korban bencana kebakaran Kamis (10/6/2021).

Bantuan berupa mie instan dan beras dari Ormas (Organ-



Ketua DPP LAKAS HM Yusuf menyaksikan secara simbolik bantuan LAKAS yang disampaikan Ketua DPC Balikpapan Babe Jali ke salah satu petugas posko kebakaran Gunung Bugis, Kamis (10/6/2021).

isasi Masyarakat) Lakas ini di sampaikan langsung oleh Ketua DPP LAKAS H.Muhammad Yusuf didampingi Sebelah kiri ketua DPP nama HM Yusuf yang ditengah Ketua DPC Kota Balikpapan Babe Jali, Sekretaris DPC Buyung Boim beserta struktur pengurus lainnya.

Setelah menyampaikan bantuan, Babe Jali didampingi Buyung mengatakan apa yang diberikan

LAKAS kepada warga korban kebakaran di Gunung Bugis tidaklah seberapa nilainya. Semoga apa yang kami berikan ini dapat meringankan beban Saudara-saudara kita yang mengalami musibah.

"Alhamdulillah Allah SWT masih memberikan Rahmat dan nikmat sehat dan rejeki pada kami Ketua beserta pengurus dan anggota



Berfoto bersama Ormas LAKAS dan Petugas Posko Kebakaran Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat.

semuanya. Sehingga kami bisa berbagi untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Gunung Bugis ini. Barangnya tidaklah seberapa semoga Allah SWT ridho dan bermanfaat untuk saudara-saudaraku," ujarnya.

Kemudian Buyung mengatakan LAKAS Ormas yang keberadaannya cukup lama di Kaltim umumnya dan khususnya di Balikpapan.

Konsolidasi dan silaturahmi kami sangat terjaga. Kami para

pendiri dan pengurus tetap komitmen dengan arah visi dan misi LAKAS mengedepan kebajikan.

"Penasehat LAKAS kami ini Habib Umar Al-Kadri, semoga peran kami ini dapat bermanfaat untuk Ummat dalam kebaikan. Apalagi Kaltim akan menjadi Ibukota Negara. Tentu nya kita selaku Ormas akan mempersiapkan diri dengan kemampuan berorganisasi yang terbaik," kata Buyung dan menambah LAKAS cinta NKRI. **(sis)**